Populis: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
P-ISSN: 1907-9893 | E-ISSN: 3090-7047
Volume 18 No. 1 | November 2023
https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/populis/index

RESEARCH ARTICLE OPEN ACCESS

Kolaborasi Multi-aktor dalam Ekowisata Mangrove: Transformasi Sosial dan Ekonomi Berbasis Komunitas di Desa Waiheru, Maluku

Multi-Actor Collaboration in Mangrove Ecotourism: Community-Based Social and Economic Transformation in Waiheru Village, Maluku

https://doi.org/10.30598/populis.18.1.1-16

Arisnu Arief Rusli[1*], Wahab Tuanaya[2], Judy de Fretes[3]
[1]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia
[2]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia
[3]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia
*arisnuarief27@gmail.com

Abstract

Community-based ecotourism has become a potential strategy for supporting sustainable development, particularly in coastal areas. This study aims to analyze the dynamics of multi-actor collaboration in the development of mangrove ecotourism in Waiheru Village, Maluku, and its impact on the social and economic transformation of the local community. The research employs a qualitative approach, utilizing data collection techniques such as in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings indicate that the development of mangrove ecotourism in Waiheru Village involves three key actors: the village government, local Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM), and youth organizations under Karang Taruna. The collaboration among these actors has led to significant social changes, including increased community awareness of mangrove conservation and the emergence of local initiatives in ecotourism management. Economically, ecotourism development has created new business opportunities for the community, increased income through the tourism sector, and encouraged economic diversification within the village. The novelty of this study lies in identifying effective patterns of multi-actor collaboration within the context of community-based ecotourism, which can serve as a model for other regions with similar potential. This study recommends policies that support the sustainability of community-based ecotourism, capacity-building initiatives for local communities in ecotourism management, and the strengthening of synergy between the government, private sector, and local communities to ensure the long-term benefits of mangrove ecotourism. With a holistic and participatory approach, ecotourism can become a vital instrument for enhancing community welfare while preserving coastal ecosystems.

Keywords: *Mangrove Ecotourism, Multi-Actor Collaboration, Social Transformation, Community-Based Economy, Local Wisdom*

Info Artikel
Naskah diterima: *03/01/2023*
Revisi terakhir: *30/01/2023*
Disetujui: *12/02/2023*

Copyright © by the Authors

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Ekosistem mangrove memiliki peran fundamental dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir dan menyediakan berbagai jasa ekosistem yang mendukung kehidupan masyarakat. Mangrove berperan sebagai benteng alami yang melindungi wilayah pesisir dari abrasi, badai, serta intrusi air laut (Van Dyke et al., 2020). Selain itu, ekosistem ini juga berfungsi sebagai habitat bagi berbagai spesies biota laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir (Ali et al., 2022). Namun, tekanan akibat konversi lahan menjadi pemukiman dan tambak, eksploitasi berlebihan, serta minimnya kesadaran masyarakat

terhadap pentingnya konservasi mangrove telah menyebabkan degradasi yang signifikan di berbagai wilayah, termasuk di Desa Waiheru, Maluku (Sukojo et al., 2017). Keberadaan mangrove yang semakin terancam mendorong munculnya inisiatif ekowisata berbasis komunitas sebagai strategi untuk menjaga keseimbangan ekologi sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal (Bardhan, 2021; Phelan et al., 2020).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas ekowisata mangrove sebagai pendekatan strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Novandi & Adi (2021) dan Phelan et al. (2020) menyoroti bahwa ekowisata berbasis komunitas dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui peningkatan pendapatan dari sektor wisata dan jasa lingkungan. Studi lain oleh Fistiningrum & Harini (2021) menemukan bahwa keterlibatan komunitas dalam pengelolaan ekowisata mangrove berkontribusi terhadap kelestarian ekosistem dan penguatan ekonomi lokal. Menurut Purwanti et al. (2021), keberhasilan ekowisata mangrove sangat bergantung pada sistem tata kelola yang baik, yang melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Selain itu, penelitian oleh Setini et al. (2021) menegaskan bahwa dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah sangat diperlukan untuk memperkuat kelembagaan lokal dalam pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan.

Di sisi lain, beberapa penelitian juga mengidentifikasi tantangan dalam pengembangan ekowisata mangrove berbasis komunitas. Kia (2021) menunjukkan bahwa kurangnya sinergi antara pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta sering kali menjadi hambatan utama dalam implementasi ekowisata yang efektif. Sementara itu, Kenawy et al. (2017) menekankan bahwa kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mengelola ekowisata masih menjadi kendala yang perlu diatasi melalui program pelatihan dan pendampingan. Studi oleh Bodin et al. (2020) dan Wondirad et al. (2020) menambahkan bahwa konflik kepentingan antara konservasi dan eksploitasi sumber daya menjadi isu krusial yang harus diselesaikan melalui pendekatan kolaboratif.

Dalam konteks Desa Waiheru, pengembangan ekowisata mangrove berbasis komunitas dapat menjadi solusi inovatif untuk mendukung keberlanjutan ekosistem pesisir dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Model kolaborasi multi-aktor, yang melibatkan pemerintah desa, Karang Taruna, serta pelaku UMKM lokal, dapat menjadi strategi efektif dalam memastikan keberhasilan ekowisata berbasis komunitas (Boldrini & Antheaume, 2021; Merlin-Brogniart et al., 2022; Mukhopadhyay & Bouwman, 2018). Penelitian oleh Gumede & Nzama (2019, 2021) menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam pengelolaan ekowisata dapat meningkatkan kepemilikan sosial terhadap program ekowisata, sehingga masyarakat lebih berkomitmen dalam menjaga keberlanjutannya. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara berbagai aktor serta dukungan kebijakan yang berpihak pada pengelolaan ekowisata berbasis komunitas menjadi faktor kunci dalam pengembangan ekowisata mangrove yang berkelanjutan di Desa Waiheru, Maluku.Meskipun telah banyak penelitian yang membahas ekowisata mangrove, sebagian besar masih berfokus pada aspek konservasi atau dampak ekonomi secara terpisah. Padahal, keterlibatan berbagai aktor dalam

pengelolaan ekowisata berbasis komunitas merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilannya. Beberapa penelitian yang menyinggung kolaborasi multi-aktor masih terbatas dalam mengkaji bagaimana dinamika sosial dan ekonomi terbentuk dalam konteks lokal yang spesifik. Oleh karena itu, kajian mengenai interaksi pemerintah desa, UMKM, dan pemuda dalam wadah karang taruna dalam membentuk sistem ekowisata yang berkelanjutan menjadi sangat relevan.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menyoroti bagaimana kolaborasi antaraktor dalam ekowisata mangrove di Desa Waiheru tidak hanya berdampak pada aspek konservasi lingkungan, tetapi juga mengarah pada transformasi sosial dan ekonomi yang lebih luas. Dengan pendekatan ini, penelitian ini menawarkan wawasan baru mengenai pola kerja sama yang dapat diadaptasi di wilayah lain dengan kondisi serupa. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya model pengelolaan berbasis komunitas yang inklusif, di mana peran serta aktif masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan ekowisata yang berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kolaborasi multi-aktor dalam ekowisata mangrove di Desa Waiheru, memahami peran masing-masing aktor, serta mengevaluasi dampak yang dihasilkan baik secara sosial maupun ekonomi. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu sosial dan humaniora, serta menjadi rujukan bagi kebijakan pembangunan ekowisata yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam kolaborasi multi-aktor dalam ekowisata mangrove di Desa Waiheru. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi kompleksitas interaksi sosial dan ekonomi dalam pengelolaan ekowisata (Creswell & Poth, 2016). Studi kasus memberikan fleksibilitas dalam menggali dinamika sosial secara kontekstual serta menangkap berbagai perspektif dari aktor yang terlibat. Batasan penelitian ini mencakup ruang lingkup geografis yang terbatas di Desa Waiheru, dengan fokus utama pada kolaborasi antara pemerintah desa, pelaku UMKM, dan karang taruna. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara luas, melainkan sebagai model yang dapat diterapkan dalam konteks serupa.

Lokasi penelitian dipilih di Desa Waiheru karena memiliki potensi ekowisata mangrove yang signifikan namun masih dalam tahap pengembangan. Waiheru juga menunjukkan keterlibatan aktif komunitas lokal dalam pengelolaan ekowisata, yang menjadi aspek krusial dalam penelitian ini. Dibandingkan dengan lokasi lain, Waiheru menawarkan kombinasi unik antara ekosistem mangrove yang masih relatif lestari dan keterlibatan multi-aktor dalam upaya pengelolaannya. Faktor ini menjadikan Waiheru sebagai studi kasus yang relevan untuk memahami bagaimana model kolaborasi dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan ekowisata berbasis komunitas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemerintah desa, pelaku UMKM, dan anggota karang taruna, serta observasi partisipatif di lokasi ekowisata. Dari pihak pemerintah desa, wawancara dilakukan dengan kepala desa, perangkat desa yang bertanggung jawab atas pariwisata dan lingkungan, serta ketua badan usaha milik desa (BUMDes). Dari pelaku UMKM, wawancara dilakukan dengan enam orang yang terdiri dari pengrajin souvenir berbasis mangrove, pemilik warung kuliner lokal, dan penyedia jasa wisata. Sementara itu, dari karang taruna, wawancara melibatkan delapan orang yang berperan dalam operasional ekowisata, pengelolaan wisata edukasi, serta promosi digital ekowisata Desa Waiheru. Selain itu, dilakukan studi dokumentasi terhadap kebijakan lokal dan publikasi terkait pengelolaan ekowisata berbasis komunitas.

Analisis data menggunakan teknik analisis tematik (Christou, 2022), yang memungkinkan identifikasi pola-pola penting dalam kolaborasi multi-aktor. Proses analisis dimulai dengan transkripsi hasil wawancara, yang kemudian dikoding secara tematik untuk mengidentifikasi pola interaksi antaraktor. Setelah itu, dilakukan kategorisasi berdasarkan tema utama yang muncul dalam data. Untuk memastikan keabsahan data, triangulasi dilakukan dengan tiga pendekatan utama: triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari kepala desa, pelaku UMKM, dan anggota karang taruna; triangulasi metode, yakni mengombinasikan wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi; serta triangulasi peneliti, yakni diskusi dengan rekan peneliti untuk menghindari bias interpretasi (Majumdar, 2022). Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih objektif dan mendalam terkait dinamika kolaborasi multi-aktor dalam ekowisata berbasis komunitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Desa sebagai Fasilitator dalam Model Kolaboratif Berbasis Komunitas

Sebagai pemegang otoritas di tingkat lokal, pemerintah Desa Waiheru memiliki peran krusial dalam merancang dan menerapkan kebijakan untuk mendukung pengelolaan ekowisata berbasis komunitas. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah penyusunan Peraturan Desa (Perdes) mengenai pengelolaan ekowisata mangrove. Peraturan ini mengatur zonasi kawasan wisata, pembagian peran antara komunitas lokal dan pemerintah desa, serta standar operasional yang harus diterapkan dalam pengelolaan ekowisata. Menurut Kepala Desa Waiheru, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan ekowisata tetap menjaga kelestarian lingkungan. “Kami tidak ingin ekowisata ini hanya sekadar mendatangkan wisatawan, tetapi juga harus menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu, kami menetapkan aturan yang melindungi hutan mangrove dari eksploitasi yang berlebihan,” ungkapnya dalam wawancara.

Selain Perdes, pemerintah desa juga menjalin kerja sama dengan dinas pariwisata dan lingkungan hidup di tingkat kabupaten untuk mendapatkan panduan teknis dalam pengelolaan kawasan ekowisata. Observasi lapangan menunjukkan bahwa regulasi ini diterapkan secara nyata dalam praktik di lapangan, misalnya dengan adanya jalur trekking

yang dibangun secara hati-hati agar tidak merusak akar mangrove serta pemberlakuan aturan pembatasan jumlah wisatawan pada waktu-waktu tertentu untuk menghindari over-tourism. Kebijakan ini sejalan dengan konsep *Community-Based Tourism* (CBT) yang menekankan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan wisata. Menurut Pornprasit & Rurkkhum (2019) dan Yanes et al. (2019), keberhasilan ekowisata berbasis komunitas sangat bergantung pada seberapa besar masyarakat lokal terlibat dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

Selain regulasi, dukungan infrastruktur dan kelembagaan juga menjadi aspek penting yang diberikan oleh pemerintah desa dalam pengembangan ekowisata mangrove. Salah satu bentuk dukungan yang paling nyata adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berperan sebagai pengelola utama ekowisata. BUMDes Waiheru memiliki tugas untuk mengelola pendapatan dari ekowisata, mengatur distribusi keuntungan kepada masyarakat, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pelaku UMKM dan karang taruna. Ketua BUMDes menuturkan bahwa pendapatan dari ekowisata sebagian dialokasikan untuk konservasi, pengembangan fasilitas wisata, serta pelatihan bagi masyarakat. “Kami menggunakan sebagian keuntungan untuk mendanai pelatihan pengelolaan ekowisata bagi pemuda desa, sehingga mereka bisa menjadi pemandu wisata yang profesional,” jelasnya.

Dari hasil observasi, terlihat bahwa infrastruktur dasar yang telah dibangun oleh pemerintah desa cukup memadai untuk mendukung wisata berbasis lingkungan. Jalur trekking mangrove sudah dibuat dengan material kayu ramah lingkungan, sementara fasilitas seperti gazebo dan menara pandang telah disediakan untuk wisatawan. Selain itu, papan informasi mengenai ekosistem mangrove juga ditempatkan di berbagai titik sebagai bagian dari edukasi wisata.

Dalam konteks kelembagaan, dukungan pemerintah desa tidak hanya sebatas BUMDes, tetapi juga mencakup pendampingan kepada pelaku UMKM lokal. Pemerintah desa bekerja sama dengan dinas koperasi dan UMKM untuk memberikan pelatihan mengenai pemasaran digital dan manajemen usaha kepada masyarakat. Dengan adanya dukungan ini, produk lokal seperti kerajinan berbahan baku mangrove dan kuliner khas semakin dikenal oleh wisatawan. Pendekatan ini mencerminkan peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam model kolaboratif berbasis komunitas, sebagaimana dikemukakan oleh Arnstein (2019) dalam konsep *ladder of citizen participation*, di mana pemerintah bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan komunitas dengan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk mengelola wisata secara mandiri.

Meskipun memiliki berbagai kebijakan dan dukungan kelembagaan, implementasi ekowisata mangrove di Desa Waiheru masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah tumpang tindih regulasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah. Beberapa aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten terkait pengelolaan kawasan konservasi kadang kurang sejalan dengan kebijakan ekowisata berbasis komunitas yang diusung oleh desa. Menurut Sekretaris Desa Waiheru, dalam beberapa kasus, regulasi dari tingkat kabupaten menghambat fleksibilitas desa dalam mengembangkan ekowisata.

"Kami ingin lebih leluasa dalam mengelola kawasan wisata ini, tetapi sering kali ada kebijakan dari kabupaten yang mengharuskan kami mengikuti prosedur yang panjang dan birokratis," ujarnya.

Selain itu, keterbatasan anggaran desa juga menjadi kendala dalam pengembangan ekowisata. Dana desa yang dialokasikan untuk sektor pariwisata masih bersaing dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar lainnya, seperti jalan desa dan sarana kesehatan. Akibatnya, pemerintah desa harus mencari alternatif pendanaan dari program bantuan pemerintah pusat maupun mitra swasta. Dari hasil observasi, terlihat bahwa meskipun jalur trekking dan fasilitas dasar telah dibangun, masih ada beberapa infrastruktur yang perlu ditingkatkan, seperti toilet umum dan pusat informasi wisata. Keterbatasan anggaran juga berpengaruh pada pemeliharaan fasilitas wisata, di mana beberapa bagian jalur trekking sudah mulai mengalami kerusakan akibat kurangnya perawatan.

Tantangan lainnya adalah kurangnya koordinasi antara berbagai aktor yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata. Meskipun pemerintah desa telah berupaya untuk membangun sinergi antara UMKM dan karang taruna, dalam beberapa kasus masih terjadi kesalahpahaman mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan temuan Ngo et al. (2018) yang menyebutkan bahwa salah satu hambatan utama dalam pengembangan ekowisata berbasis komunitas adalah kesulitan dalam menyelaraskan kepentingan berbagai pihak yang terlibat. Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah desa mulai memperkuat koordinasi melalui pertemuan rutin antara pengelola ekowisata, pemerintah desa, dan kelompok masyarakat. Selain itu, mereka juga berupaya untuk membangun kerja sama dengan pihak akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) guna mendapatkan pendampingan teknis dalam pengelolaan ekowisata.

Peran pemerintah desa dalam pengelolaan ekowisata mangrove tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjembatani kolaborasi antara berbagai aktor. Pemerintah desa tidak bertindak sebagai pelaku utama ekowisata, tetapi lebih berperan dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi partisipasi masyarakat. Konsep ini sejalan dengan pendekatan *governance-based tourism development* yang dikemukakan oleh Bahrudin (2022), di mana keberhasilan pengelolaan wisata tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada sinergi antara berbagai pemangku kepentingan. Dengan peran fasilitator yang semakin kuat, pemerintah desa dapat memastikan bahwa ekowisata mangrove di Waiheru berkembang secara inklusif dan berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, serta tetap menjaga keseimbangan ekologi.

Ekowisata sebagai Katalisator Penguatan Ekonomi Berbasis Lokal

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Waiheru memainkan peran sentral dalam mendukung keberlanjutan ekowisata mangrove. Para pelaku UMKM berkontribusi dalam berbagai aspek, mulai dari penyediaan kuliner khas, pembuatan souvenir berbasis mangrove, hingga jasa wisata yang melengkapi pengalaman wisatawan. Di sektor kuliner, masyarakat setempat memanfaatkan hasil laut dan sumber daya lokal untuk menciptakan menu khas yang hanya dapat ditemukan di Waiheru, seperti olahan kepiting

bakau, udang mangrove, dan ikan kuah kuning. Salah seorang pelaku usaha kuliner, Ibu RN, menceritakan bagaimana ekowisata membuka peluang baru bagi usahanya. “Dulu saya hanya menjual makanan laut ke pasar, tetapi setelah banyak wisatawan datang, saya mulai menjual olahan khas di warung dekat lokasi wisata. Sekarang saya bisa mendapat pelanggan tetap dari luar desa,” ujarnya.

Selain kuliner, UMKM lokal juga memproduksi souvenir berbasis mangrove, seperti batik dengan motif akar dan daun mangrove, miniatur pohon mangrove dari kayu apung, serta sabun dan lilin aromaterapi berbahan baku ekstrak mangrove. Produk-produk ini tidak hanya menarik bagi wisatawan tetapi juga mendukung edukasi tentang manfaat mangrove bagi lingkungan. Dari hasil observasi lapangan, terlihat bahwa produk-produk souvenir ini banyak diminati oleh wisatawan yang ingin membawa kenang-kenangan dari Waiheru. Beberapa toko souvenir di sekitar kawasan wisata bahkan sudah menggunakan sistem pembayaran digital untuk mempermudah transaksi, menunjukkan bahwa pelaku UMKM mulai beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang lebih modern.

Di sektor jasa wisata, para pemuda desa yang tergabung dalam UMKM berbasis layanan menyediakan berbagai paket wisata, seperti tur edukasi mangrove, penyewaan perahu untuk berkeliling hutan bakau, serta jasa pemandu wisata. Karang taruna setempat juga berinisiatif mengadakan pelatihan kepada para pemuda untuk menjadi pemandu wisata yang tidak hanya memberikan informasi tentang ekosistem mangrove tetapi juga mampu menjelaskan sejarah dan budaya lokal.

Keberadaan ekowisata mangrove di Waiheru telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi pelaku UMKM. Pendapatan mereka meningkat, terutama pada akhir pekan dan musim liburan ketika jumlah kunjungan wisatawan meningkat drastis. Para pelaku usaha yang sebelumnya hanya bergantung pada pelanggan lokal kini memiliki pasar yang lebih luas, termasuk wisatawan dari luar daerah dan mancanegara. Pak HS, seorang pengrajin kayu yang membuat miniatur pohon mangrove, mengungkapkan bahwa sebelum adanya ekowisata, ia hanya menjual hasil karyanya di pasar desa dengan harga yang rendah. “Sekarang, produk saya bisa dijual lebih mahal karena wisatawan menganggapnya unik dan bernilai seni tinggi. Saya juga mulai menjual secara online melalui media sosial,” katanya.

Namun, di balik manfaat ekonomi yang diperoleh, para pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah fluktuasi jumlah wisatawan yang berdampak pada ketidakstabilan pendapatan. Pada musim hujan atau ketika ada pembatasan perjalanan, jumlah pengunjung menurun drastis, membuat sebagian pelaku usaha kesulitan menjaga keberlangsungan bisnis mereka.

Selain itu, keterbatasan modal dan akses permodalan menjadi kendala yang dihadapi oleh banyak UMKM. Beberapa pelaku usaha mengandalkan dana pribadi untuk mengembangkan bisnis mereka karena akses ke kredit perbankan masih terbatas. Menurut Ketua UMKM Waiheru, pemerintah desa telah berupaya memberikan bantuan modal melalui BUMDes, tetapi jumlahnya masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan. Dari hasil observasi, terlihat bahwa beberapa pelaku UMKM masih menggunakan metode produksi

yang sederhana dengan peralatan terbatas. Beberapa di antara mereka juga mengalami kesulitan dalam mengembangkan kemasan produk agar lebih menarik bagi wisatawan. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan terkait inovasi produk menjadi kebutuhan mendesak agar UMKM dapat lebih berkembang.

Menyadari pentingnya beradaptasi dengan preferensi wisatawan, para pelaku UMKM di Waiheru mulai mengembangkan inovasi dalam produk dan layanan mereka. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah penggunaan kemasan ramah lingkungan untuk produk kuliner dan souvenir guna mendukung konsep ekowisata berkelanjutan. Selain itu, beberapa pelaku usaha telah memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan dan menjual produk mereka. Misalnya, beberapa pengrajin batik mangrove telah bekerja sama dengan influencer lokal untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih luas.

Salah satu contoh menarik adalah usaha kelompok pemuda yang menawarkan paket wisata berbasis pengalaman. Mereka tidak hanya menyediakan tur hutan mangrove tetapi juga menawarkan wisatawan kesempatan untuk ikut serta dalam penanaman mangrove dan belajar langsung tentang manfaat ekosistem ini. Inovasi ini mendapat respons positif dari wisatawan, terutama mereka yang tertarik dengan wisata edukasi dan konservasi.

Dari temuan ini, dapat dikatakan bahwa ekowisata di Waiheru telah menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi berbasis lokal, terutama bagi pelaku UMKM. Konsep ini sejalan dengan teori *Pro-Poor Tourism* (PPT) yang dikemukakan oleh Akrong (2019), di mana pariwisata dapat berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha baru. Dalam konteks Waiheru, ekowisata tidak hanya memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat tetapi juga mendorong diversifikasi ekonomi desa. Sebelumnya, sebagian besar masyarakat hanya bergantung pada sektor perikanan dan pertanian, tetapi kini mereka memiliki sumber pendapatan tambahan dari sektor pariwisata.

Lebih lanjut, ekowisata di Waiheru telah mendorong ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Produk-produk yang dihasilkan tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga memiliki nilai budaya dan edukasi yang tinggi, mencerminkan identitas lokal yang kuat. Namun, agar manfaat ekonomi ini dapat berkelanjutan, diperlukan upaya lebih lanjut dalam mendukung UMKM, baik dari sisi akses permodalan, pelatihan, maupun pemasaran. Konsep *Sustainable Livelihood Approach* (SLA) yang dikembangkan oleh Serrat & Serrat (2017) menekankan bahwa ketahanan ekonomi masyarakat lokal dapat diperkuat melalui diversifikasi pendapatan, peningkatan keterampilan, dan akses ke sumber daya yang memadai.

Dalam hal ini, sinergi antara pemerintah desa, BUMDes, dan pelaku usaha menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan pendampingan yang berkelanjutan, ekowisata di Waiheru memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai model pengelolaan wisata berbasis komunitas yang tidak hanya berorientasi pada ekonomi tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan budaya.

Peran Pemuda sebagai Agen Perubahan dalam Pengelolaan Ekowisata Berbasis Komunitas

Pemuda, khususnya anggota Karang Taruna, memegang peranan penting dalam pengelolaan ekowisata berbasis komunitas, yang tidak hanya mencakup promosi dan pengembangan destinasi wisata, tetapi juga berfokus pada konservasi alam, salah satunya melalui kegiatan penanaman mangrove. Hutan mangrove memiliki peranan ekologis yang sangat vital, seperti sebagai habitat bagi berbagai spesies laut, pelindung pantai dari abrasi, dan penyaring polusi. Dalam hal ini, Karang Taruna Desa Waiheru di Kota Ambon menjadi contoh konkret dari peran pemuda dalam pelestarian alam melalui ekowisata dan konservasi.

Hutan mangrove di Desa Waiheru, dengan luas sekitar 16,60 hektar, memiliki potensi besar untuk mendukung ekowisata sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Oleh karena itu, pemuda dari Karang Taruna Desa Waiheru aktif terlibat dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan mangrove. Kolaborasi antara Karang Taruna, Pemerintah Desa Waiheru, dan masyarakat setempat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pelestarian mangrove dan pengembangan ekowisata. “Kami bekerja bersama-sama dengan warga dan Pemerintah Desa untuk melakukan penanaman mangrove secara rutin setiap tahun. Selain itu, kami juga menjaga agar mangrove tidak rusak dengan mengawasi agar tidak ada yang menebang pohon atau menjadikannya tempat sampah,” ujar FE, Ketua Karang Taruna Desa Waiheru.

Keterlibatan pemuda dalam penanaman mangrove bukan hanya untuk menjaga kelestarian alam, tetapi juga sebagai sarana untuk pengembangan ekonomi berbasis ekowisata. Seperti yang diungkapkan oleh SSL, Penjabat Desa Waiheru, “Ekowisata mangrove dapat menjadi potensi yang menguntungkan bagi pendapatan asli desa (PADes) jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kami mengkoordinir para pemuda, terutama Karang Taruna, untuk aktif terlibat dalam menjaga hutan mangrove, agar ekosistemnya tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekowisata.” Dengan pendekatan ini, Desa Waiheru tidak hanya memperoleh manfaat ekologis dari keberadaan hutan mangrove, tetapi juga memanfaatkan potensi wisata yang dapat mendatangkan pendapatan tambahan bagi desa.

Sinergi antara pemuda, masyarakat, dan pemerintah daerah menjadi elemen kunci dalam keberlanjutan program ekowisata berbasis komunitas. Pemuda Karang Taruna tidak hanya berperan sebagai penggerak dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan mangrove, tetapi juga sebagai penghubung antara berbagai pihak yang terlibat. Di Desa Waiheru, misalnya, berbagai pihak seperti Babinsa, Babinkamtibmas, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan penyuluh pertanian turut berperan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove. “Kegiatan ini melibatkan seluruh stakeholder yang berkepentingan dengan pelestarian mangrove dan pengembangan ekowisata, sehingga dapat tercipta keseimbangan antara pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata HA, Tokoh Masyarakat Desa Waiheru.

Namun, meskipun antusiasme pemuda sangat tinggi, mereka tetap menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi sumber daya maupun kesadaran masyarakat. Salah satu

kendala utama adalah keterbatasan dana untuk mendukung kegiatan konservasi dan pengembangan ekowisata. Seperti yang diungkapkan oleh AG, anggota Karang Taruna, "Terkadang kami merasa kesulitan dalam mencari pendanaan untuk memperluas kegiatan kami. Namun, kami terus berusaha dan mencari cara untuk tetap mengembangkan ekowisata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada." Selain itu, meskipun ada pelarangan dari Pemerintah Desa untuk merusak mangrove, kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan mangrove masih perlu ditingkatkan.

Dalam pengamatan di lapangan, dapat terlihat bahwa meskipun ada semangat besar dari Karang Taruna dan masyarakat, masih terdapat beberapa tantangan terkait pengelolaan ekowisata mangrove. Meskipun penanaman mangrove dilakukan setiap tahun, pengelolaan sampah di sekitar kawasan mangrove dan pengawasan terhadap aktivitas ilegal seperti penebangan pohon atau pembangunan pemukiman masih menjadi isu yang perlu perhatian lebih. Aktivitas pengunjung yang tidak bertanggung jawab terkadang merusak ekosistem di sekitar hutan mangrove. Meskipun demikian, upaya-upaya yang dilakukan oleh Karang Taruna dalam mengedukasi masyarakat dan pengunjung melalui program-program seperti "bersih-bersih pantai" dan edukasi tentang pentingnya konservasi alam sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bersama.

Dari temuan di atas, dapat dikatakan bahwa pemuda sebagai agen perubahan sangat relevan dalam konteks pengelolaan ekowisata berbasis komunitas. Pemuda di Karang Taruna Desa Waiheru telah membuktikan diri sebagai katalisator perubahan yang tidak hanya terlibat dalam pengembangan pariwisata, tetapi juga dalam menjaga kelestarian alam. Dalam hal ini, pemuda memainkan peran penting dalam membentuk pola pikir masyarakat yang lebih peduli terhadap pelestarian alam dan menjadikannya bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Pemuda Karang Taruna di Desa Waiheru tidak hanya mengandalkan kemampuan mereka dalam promosi digital dan pengembangan ekowisata, tetapi juga menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap kelestarian lingkungan. Mereka memahami bahwa ekowisata bukan sekadar aktivitas wisata, tetapi juga upaya konservasi yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Melalui sinergi dengan pemerintah dan masyarakat, pemuda menjadi penggerak utama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove dan mengembangkan potensi wisata yang berbasis pada keberlanjutan lingkungan.

Namun, tantangan terbesar dalam peran pemuda sebagai agen perubahan adalah bagaimana mereka dapat mengatasi keterbatasan sumber daya dan kesadaran masyarakat. Tanpa adanya kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak, program ekowisata dan konservasi ini bisa terancam tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pemuda untuk terus memperkuat kerjasama dengan berbagai aktor lainnya, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, guna memastikan bahwa pengelolaan ekowisata berbasis komunitas dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. Pemuda, dengan semangat dan inisiatif mereka, dapat menjadi pionir dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Ekowisata sebagai Strategi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Desa Pesisir

Ekowisata, sebagai alternatif pariwisata yang berbasis pada pelestarian alam dan pemberdayaan komunitas lokal, memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat di sekitar kawasan ekowisata. Di Desa Waiheru, misalnya, hadirnya ekowisata mangrove telah membawa perubahan positif bagi pendapatan masyarakat setempat. Sebelum adanya pengembangan ekowisata mangrove, sebagian besar pendapatan masyarakat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan tradisional. Namun, dengan hadirnya ekowisata, masyarakat mulai merasakan keberagaman pendapatan yang lebih stabil dan beragam.

Salah satu dampak positif yang langsung dirasakan adalah peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata. Warga desa yang sebelumnya hanya mengandalkan hasil laut atau pertanian kini mulai terlibat dalam kegiatan ekowisata, baik itu sebagai pemandu wisata, pengelola homestay, hingga penjual cendera mata khas desa. “Pendapatan kami mulai meningkat sejak kami membuka desa untuk wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam mangrove. Kami mendapatkan pendapatan tambahan dari jasa pemanduan dan penginapan, yang sebelumnya tidak ada,” ujar RN, seorang pengelola homestay di Desa Waiheru.

Kehadiran ekowisata mangrove juga membuka peluang baru bagi masyarakat untuk diversifikasi sumber penghasilan mereka. Masyarakat yang awalnya hanya mengandalkan satu jenis pekerjaan kini dapat menjalankan usaha mikro yang terkait dengan pariwisata, seperti warung makan, penyewaan alat snorkeling, dan penjualan produk kerajinan tangan. “Sekarang, selain bertani, saya juga bisa mendapatkan penghasilan dari menjual suvenir dan menyediakan makanan ringan untuk wisatawan. Ini benar-benar membantu perekonomian keluarga,” tambah AMR, seorang pengrajin di Desa Waiheru.

Dalam observasi yang dilakukan di lapangan, terlihat adanya peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan ekowisata mangrove. Warung makan kecil, toko suvenir, dan penginapan sederhana telah berkembang pesat seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang. Masyarakat tampak lebih aktif dalam menjalankan usaha mikro yang berbasis pada kebutuhan wisatawan. Pemandu wisata lokal juga menunjukkan semangat baru, dengan pengetahuan yang lebih mendalam tentang pentingnya konservasi mangrove dan keanekaragaman hayati di sekitar mereka. Aktivitas ini memberikan dampak positif bagi perekonomian desa, mengingat semakin banyaknya wisatawan yang menghabiskan uang mereka untuk pengalaman lokal yang unik.

Namun, dalam pengamatan juga ditemukan beberapa tantangan. Salah satunya adalah ketergantungan pada wisatawan yang dapat berfluktuasi, tergantung pada musim wisata. Hal ini berpotensi mempengaruhi kestabilan pendapatan masyarakat lokal. Oleh karena itu, penting bagi desa untuk terus mengembangkan produk ekowisata lainnya yang tidak hanya bergantung pada musim tertentu, seperti pelatihan bagi pemandu wisata, pengembangan homestay yang ramah lingkungan, serta program edukasi untuk wisatawan yang menekankan pada pentingnya konservasi.

Ekowisata telah terbukti menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa pesisir, seperti yang terjadi di Desa Waiheru. Dengan mengintegrasikan elemen pelestarian alam ke dalam kegiatan ekonomi, ekowisata tidak hanya memberikan pendapatan langsung bagi masyarakat, tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi mikro yang berkelanjutan. Konsep ekonomi berkelanjutan dalam ekowisata bertujuan untuk memaksimalkan manfaat ekonomi tanpa merusak ekosistem yang menjadi daya tarik utama. Di Desa Waiheru, pengelolaan ekowisata mangrove dengan melibatkan masyarakat setempat secara aktif menciptakan lapangan pekerjaan baru, mendiversifikasi sumber pendapatan, dan membuka peluang untuk inovasi bisnis lokal.

Penerapan ekowisata sebagai strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan juga menyiratkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dalam hal ini, masyarakat Desa Waiheru tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga berinvestasi dalam keberlanjutan sumber daya alam yang akan mendukung ekonomi mereka dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pengembangan ekowisata di Desa Waiheru berfokus pada keberlanjutan, dengan memastikan bahwa pengelolaan mangrove dilakukan dengan bijaksana, menghindari eksploitasi berlebihan, dan menjaga ekosistem tetap utuh.

Namun, untuk memastikan keberlanjutan ekowisata sebagai strategi pembangunan ekonomi, tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana mengurangi ketergantungan pada musim wisata dan menciptakan model ekonomi yang dapat berjalan sepanjang tahun. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan diversifikasi produk ekowisata, seperti penyelenggaraan festival budaya lokal, kegiatan edukasi lingkungan, atau wisata berbasis komunitas yang melibatkan keterampilan lokal. Dengan cara ini, pendapatan masyarakat dapat lebih stabil, bahkan di luar musim wisata.

Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mendukung pengembangan infrastruktur dan pemasaran ekowisata juga sangat penting. Pemerintah dapat menyediakan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sementara sektor swasta dapat berperan dalam mengembangkan fasilitas yang ramah lingkungan dan mendukung kegiatan ekowisata yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta ini akan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ekowisata berbasis komunitas di Desa Waiheru, Maluku, berhasil mendorong transformasi sosial dan ekonomi yang signifikan melalui kolaborasi multi-aktor. Kolaborasi antara pemerintah desa, UMKM lokal, dan karang taruna telah menciptakan sinergi yang kuat dalam pengelolaan ekowisata mangrove, yang berdampak positif pada peningkatan kesadaran lingkungan serta pembukaan peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi mangrove semakin tinggi, dan munculnya inisiatif lokal dalam pengelolaan ekowisata menjadi

bukti bahwa ekowisata dapat mengubah pola pikir dan pola hidup masyarakat desa yang lebih berkelanjutan. Secara ekonomi, pengembangan ekowisata telah membuka jalur baru dalam diversifikasi ekonomi, dengan sektor pariwisata yang berkembang pesat dan memberi dampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat. Ini juga mendorong terbukanya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berbasis pada produk lokal serta layanan terkait ekowisata. Oleh karena itu, ekowisata mangrove di Desa Waiheru bukan hanya memberikan manfaat ekonomi langsung, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan yang menjunjung tinggi prinsip konservasi dan pemberdayaan komunitas lokal. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penekanan pada kolaborasi multi-aktor yang efektif sebagai model pengembangan ekowisata berbasis komunitas yang dapat diterapkan di kawasan pesisir lainnya. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta adalah kunci utama dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan ekowisata sebagai strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan pemerintah untuk mendukung pengelolaan ekowisata secara berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjalankan inisiatif ini. Dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, ekowisata tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan pesisir yang sangat bernilai bagi kehidupan bersama.

PERNYATAAN ETIKA PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku, termasuk pemberian persetujuan yang diinformasikan (*informed consent*), perlindungan terhadap kerahasiaan informan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Perhatian khusus diberikan kepada partisipan dari kelompok rentan guna memastikan keselamatan, kenyamanan, dan hak partisipasi yang setara. Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal, dan penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan. Seluruh data dan informasi yang disajikan diperoleh melalui metode penelitian yang sah dan telah diverifikasi untuk memastikan akurasi dan keandalannya. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dibatasi hanya pada bantuan teknis penulisan dan penyuntingan bahasa, tanpa memengaruhi substansi ilmiah dari karya ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada para informan atas wawasan berharga yang diberikan, serta kepada para penelaah anonim atas masukan konstruktif terhadap versi awal naskah ini. Penulis bertanggung jawab penuh atas isi dan kesimpulan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Akrong, K. K. (2019). Pro-poor tourism: Critical perspective and implications for future research. *Journal of Tourism and Hospitality Management*, *7*(1), 23–35. https://doi.org/10.17265/2328-2169/2019.01.003

Ali, M. I., Malik, A., & Rahim, A. (2022). Environmental Knowledge and Attitude of Coastal Community in Decision Making to Participate in Mangrove Rehabilitation in Sinjai District South Sulawesi Indonesia. *Planning*, *17*(8), 2579–2584.

https://doi.org/10.18280/ijsdp.170826

Arnstein, S. R. (2019). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Planning Association*, *85*(1), 24–34 https://doi.org/10.1080/01944363.2018.1559388.

Bahrudin, M. (2022). Halal Tourism Governance Based on the Fatwa of the National Sharia Council on Tourism Improvement. *Journal of Environmental Management and Tourism (JEMT)*, *13*(7 (63)), 2058–2068. https://doi.org/10.14505/jemt.v13.7(63).25

Bardhan, M. (2021). An empirical study on mangrove restoration in Indian Sundarbans—a community-based environmental approach. In *Modern Cartography Series* (Vol. 10, pp. 387–405). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823895-0.00012-9

Bodin, Ö., Mancilla García, M., & Robins, G. (2020). Reconciling conflict and cooperation in environmental governance: a social network perspective. *Annual Review of Environment and Resources*, *45*(1), 471–495. https://doi.org/10.1146/annurev-environ-011020-064352

Boldrini, J.-C., & Antheaume, N. (2021). Designing and testing a new sustainable business model tool for multi-actor, multi-level, circular, and collaborative contexts. *Journal of Cleaner Production*, *309*, 127209. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127209

Christou, P. A. (2022). How to use thematic analysis in qualitative research. *Journal of Qualitative Research in Tourism*, *3*(2), 79–95. https://doi.org/10.4337/jqrt.2023.0006

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.

Fistiningrum, W., & Harini, R. (2021). The impacts of mangrove ecotourism management on the socio-economic conditions of people in kulonprogo regency. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *683*(1), 12116. https://doi.org/10.1088/1755-1315/683/1/012116

Gumede, T. K., & Nzama, A. T. (2019). Comprehensive participatory approach as a mechanism for community participation in ecotourism. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, *8*(4), 1–11.

Gumede, T. K., & Nzama, A. T. (2021). Approaches toward community participation enhancement in ecotourism. *Protected Area Management-Recent Advances*, 1–23.

Kenawy, E., Osman, T., & Alshamndy, A. (2017). What are the main challenges impeding implementation of the spatial plans in Egypt using ecotourism development as an example? *Social Sciences*, *6*(3), 75. https://doi.org/10.3390/socsci6030075

Kia, Z. (2021). Ecotourism in Indonesia: Local community involvement and the affecting factors. *Journal of Governance and Public Policy*, *8*(2), 93–105. https://doi.org/10.18196/jgpp.v8i2.10789

Majumdar, A. (2022). Thematic analysis in qualitative research. In *Research anthology on innovative research methodologies and utilization across multiple disciplines* (pp. 604–622). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-6684-3881-7.ch031

Merlin-Brogniart, C., Fuglsang, L., Magnussen, S., Peralta, A., Révész, É., Rønning, R., Rubalcaba, L., & Scupola, A. (2022). Social innovation and public service: A literature review of multi-actor collaborative approaches in five European countries. *Technological Forecasting and Social Change*, *182*, 121826. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121826

Mukhopadhyay, S., & Bouwman, H. (2018). Multi-actor collaboration in platform-based ecosystem: opportunities and challenges. *Journal of Information Technology Case and*

Application Research, *20*(2), 47–54. https://doi.org/10.1080/15228053.2018.1479160

Ngo, T., Lohmann, G., & Hales, R. (2018). Collaborative marketing for the sustainable development of community-based tourism enterprises: voices from the field. *Journal of Sustainable Tourism*, *26*(8), 1325–1343. https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1443114

Novandi, H. R., & Adi, I. R. (2021). The Impact of Local Economic Development through Community-Based Tourism on Economic Welfare of the Community in Tamansari Village, Banyuwangi, East Java, Indonesia. *Indonesian Journal of Social Work*, *5*(1), 1–11. https://doi.org/10.31595/ijsw.v5i1.406

Phelan, A., Ruhanen, L., & Mair, J. (2020). Ecosystem services approach for community-based ecotourism: towards an equitable and sustainable blue economy. *Journal of Sustainable Tourism*, *28*(10), 1665–1685. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1747475

Pornprasit, P., & Rurkkhum, S. (2019). Performance evaluation of community-based ecotourism: a case study in Satun province, Thailand. *Journal of Ecotourism*, *18*(1), 42–59. https://doi.org/10.1080/14724049.2017.1379529

Purwanti, P., Fattah, M., Qurrata, V. A., & Narmaditya, B. S. (2021). An institutional reinforcement model for the protection of mangroves sustainable ecotourism in Indonesia. *Geo Journal of Tourism and Geosites*, *35*(2), 471–479. https://doi.org/10.30892/gtg.35227-674

Serrat, O., & Serrat, O. (2017). The sustainable livelihoods approach. *Knowledge Solutions: Tools, Methods, and Approaches to Drive Organizational Performance*, 21–26. https://doi.org/10.1007/978-981-10-0983-9_5

Setini, M., Wardana, I., Sukaatmadja, I., Ekawati, N., Yasa, N., & Astawa, I. (2021). Policy models for improving ecotourism performance to build quality tourism experience and sustainable tourism. *Management Science Letters*, *11*(2), 595–608. https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.9.007

Sukojo, B. M., Hidayat, H., & Ratnasari, D. (2017). Important Value of Economic Potency Mangrove Using NDVI Satellite High Resolution Image To Support Eco Tourism Of Pamurbaya Area (Case Study: East Cost of Surabaya). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *98*(1), 12035. https://doi.org/10.1088/1755-1315/98/1/012035

Van Dyke, F., Lamb, R. L., Van Dyke, F., & Lamb, R. L. (2020). The Conservation of Aquatic Systems. *Conservation Biology: Foundations, Concepts, Applications*, 307–357. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39534-6_8

Wondirad, A., Tolkach, D., & King, B. (2020). Stakeholder collaboration as a major factor for sustainable ecotourism development in developing countries. *Tourism Management*, *78*, 104024. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2019.104024

Yanes, A., Zielinski, S., Diaz Cano, M., & Kim, S. (2019). Community-based tourism in developing countries: A framework for policy evaluation. *Sustainability*, *11*(9), 2506. https://doi.org/10.3390/su11092506